

**PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DESA GELANGSAR
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2018**

**“(Studi Kasus Desa Gelangsar Kecamatan Gunung Sari
Kabupaten Lombok Barat)”**



**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Mataram untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelara Sarjana (S1) Studi Pemerintahan**

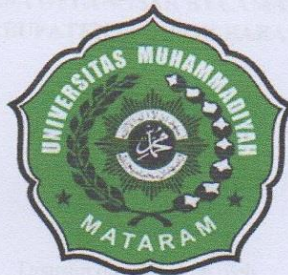
Oleh

**ARJUNA WIJAYA
NIM 21513A0006**

**KONSENTRASI POLITIK
PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DESA GELANGSAR DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
(STUDI KASUS DI DESA GELANGSAR KECAMATAN GUNUNG SARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT)



STUDI PEMERINTAHAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan dan diajukan ke panitia Ujian

Skripsi Program Studi pemerintahan

Hari : Senin

Tanggal : 02 Juli 2019

Pembimbing I

Drs.H.Darmansyah,M.Si
NIDN.0008075914

Pembimbing II

Iskandar,S.Sos,MA
NIDN. 0802048904

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP,M.IP
NIDN.0816057902

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI

PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DESA GELANGSAR DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
(STUDI KASUS DI DESA GELANGSAR KECAMATAN GUNUNG SARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT)



Disusun dan diajukan oleh

ARJUNA WIJAYA
NIM.21513A0006

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam Ujian skripsi pada tanggal 06 Juli 2019 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Tim Penguji

1. Drs.H.Darmansyah,M.Si
NIDN.0008075914
2. Iskandar,S.Sos,MA
NIDN.0802048904
3. Azwar Subandi,SH.MH
NIDN.0810818101

Ketua (.....)

Anggota I (.....)

Anggota II (.....)

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Drs.Amil,M.M
NIDN.0831126204

مَدَدٌ

Pandangilah orang tuamu maka kebahagiaan akan menghampirimu
Where there is will there is way (Dimana ada kemauan pasti ada jalan)
orang yang tidak pernah bermimpi ialah orang yang tidak akan mendapatkan mimpinya menjadi kenyataan.

'karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dan kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap' (QS. Al-Insyirah [94]:5-6)
Kesuksesan tidak akan pernah datang dengan sendirinya tanpa ada pengorbanan dan kerja keras dan doa .



PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan hasil perjuangan yang cukup melelahkan, teriring oleh waktu, kesabaran, ketekunan, dan doa serta wujud kasih sayang yang tak terkira, skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Allah Swt yang Maha Memberi Nikmat tanpa batas dan tauladan terhebat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Murobbi terbesar dalam hidupku.
- Rasa hormat, sayang dan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda (Sataming) (almarhum) dan bunda (Runing) yang tidak pernah merasa lelah memberika ndoa, kasih sayang, pengertian, dorongan semangat, materi, support dan bimbingan untukku.
- Kakakku (Magasing, S.Pd, Siti Amina, Saring, Arfandi, S.Pd yang sudah memberikan dorongan serta motivasi dan adik yang ganteng arjuang selama ini sudah menjadi penyemangat dalam penyelesaian tugas akhir, dan ponaanku Ade Aggreani, Nia Ramadhani, Salman Alfaruq sudah menjadi penyemangat paman . Jadilah anak yang pintar dan harus lebih baik daripada paman.
- Sahabat terbaikku: Zaini Darmansyah, dan teman-teman dekat Dayat, Lalu Arya Bakti, Kurniawan Solihin, Lalu Agus Salim
- Sahabat seperjuangan : Abu Rijal Bakti, Saerudin, Lutfi Hidayat, M. Sandy Tyias, Diani Nur Arpina, Andriani, Fariatin
- Dan teman seperjuangan kelas konsentrasi politik angkatan 2015-2016 yang selalu saling merangkul satu sama lain.
- Dan tak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Umi dan bibi serta tetangga kos saya yang selama ini udah menjadi keluarga saya selama dalam perantaun.

Almamater Hijau mudaku tercinta dan kampus UMMAT Mataram

**PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DESA GELANGSAR DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

**“(Studi Kasus Desa Gelangsar Kecamatan Gunung Sari
Kabupaten Lombok Barat)”**

**Oleh : ARJUNA WIJAYA
NIM : 21513A0006**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku politik masyarakat Desa Gelangsar pada Pemilu pada secara langsung di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018. Disamping itu, juga untuk mendeskripsikan perilaku memilih masyarakat Desa Gelangsar pada Pemilu pada secara langsung di Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, yakni orang-orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kecakapan yang berkaitan dengan budaya politik dan perilaku memilih masyarakat Desa Gelangsar. Sesuai kriteria tersebut didapatkan subjek penelitian, yaitu (1) Masyarakat Desa Gelangsar; (2) Ketua PPS Desa Gelangsar, Ketua PPL Desa Gelangsar, Pemilu pada secara langsung di Nusa Tenggara Barat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, perilaku politik masyarakat Desa Gelangsar bervariasi. Variasi tersebut antara lain budaya politik, subjek, dan partisipan. Namun, pola budaya politik masyarakat Desa Gelangsar cenderung mengarah pada budaya politik subjek/kaula dimana masyarakat mempunyai minat, perhatian, dan kesadaran terhadap system politik sebagai keseluruhan terutama pada aspek outputnya. Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam kegiatan politik untuk memberikan input politik boleh dikatakan sangat rendah. Kedua, pola perilaku memilih masyarakat Desa Gelangsar bervariasi. Variasi tersebut antara lain perilaku memilih sosiologis, psikologis, dan rasional. Namun, pola perilaku memilih masyarakat Desa Gelangsar cenderung mengarah pada perilaku memilih rasional daripada perilaku memilih sosiologis dan psikologis, dimana masyarakat dalam memilih dengan mengutamakan pertimbangan secara rasional (mereka memilih kandidat calon Gubernur dan wakil Gubernur atau partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian sekecil-kecilnya).

Kata kunci Perilaku politik, pemilihan Gubernur,

**POLITICAL BEHAVIOR OF THE GELANGSAR VILLAGE COMMUNITY
IN THE ELECTION OF THE GOVERNOR OF NUSA TENGGARA BARAT
IN 2018**

"(Case Study of Gelangsar Village, Gunung Sari District
West Lombok Regency) "

ABSTRACT

His research aims to describe the political behavior of the Sleman Village community in the Election each directly in the Province of West Nusa Tenggara in 2018. In addition, it is also to describe the behavior of the Sleman Village to elect the Election at each election directly in West Nusa Tenggara. This type of research is a descriptive research using a qualitative approach. Determining the subject in this study uses interview techniques, those who have experience, knowledge, and skills related to the political culture and behavior of the Slide Village community. According to the criteria, the research subjects are (1) Slide Village Community; (2) To the old PPS Desa Gelangsar, Chairman of the PPL Slide Village, the election each directly in West Nusa Tenggara. Methods of data collection in this research using in-depth interview and documentation method.

The result of this study shows that the first, political behavior of Desa Gelangsar village varies. These variations include political culture, subjects, and participants. However, the political culture pattern of the Slang Village community tends to lead to the subject culture of politics where people have an interest, attention, and awareness of the political system as a whole, especially on the output aspect. Awareness of the people as actors in political activities to provide political input can be said to be very low. Secondly, the pattern of behavioral selection of Desa Gelangsar Village varies. These variations include behavioral sociological, psychological, and rational behavior. However, the behavioral pattern of selecting the Slip Village community tends to lead to rational selective behavior from sociological and psychological selective behaviors, in which the community chooses with rational considerations preferably (they choose candidates for governors and deputies of Governors or political parties deemed to be of great advantage- its magnitude and suppress the smallest losses).

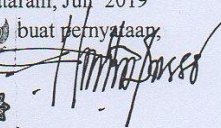
Keywords Political behavior, governing governor,

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, danataudoktor), baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Mataram, Juli 2019

buat pernyataan,

000
RUBRUPAH
ARJUNA WIJAYA
NIM: 21513A0006

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang lagi maha pengasih lagi maha penyayang kepada-Nyalah segala tumpuan harapan yang peneliti harapkan, sebab semata-mata karena karunia-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, sebagai figure sentral segala tindakan manusia pada umumnya dan umat islam pada khususnya di muka bumi ini.

Selanjutnya dalam usaha penyusunan skripsi ini sudah tentu tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan doa, baik itu secara lansung maupun tidak lansung sangat kami syukuri. Lewat kesempatan yang berbahagia ini kami ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Drs. H. Moh Junaidin, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Drs. H. Darmansyah, M. Siselaku Dosen Pembimbing I yang selama ini banyak memberikan motivasi dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya yaitu skripsi.
5. Iskandar, S.Sos, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan serta ilmunya kepada saya dalam setiap bimbingan serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
6. Dan tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada semua pegawai TU Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dalam proses pelayanan administasi.

Harapan peneliti semoga tuhan yang maha esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Akhir kata semoga Skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Amin

Mataram Juli 2019

Peneliti

ARJUNA WIJAYA
NIM:21513A0006

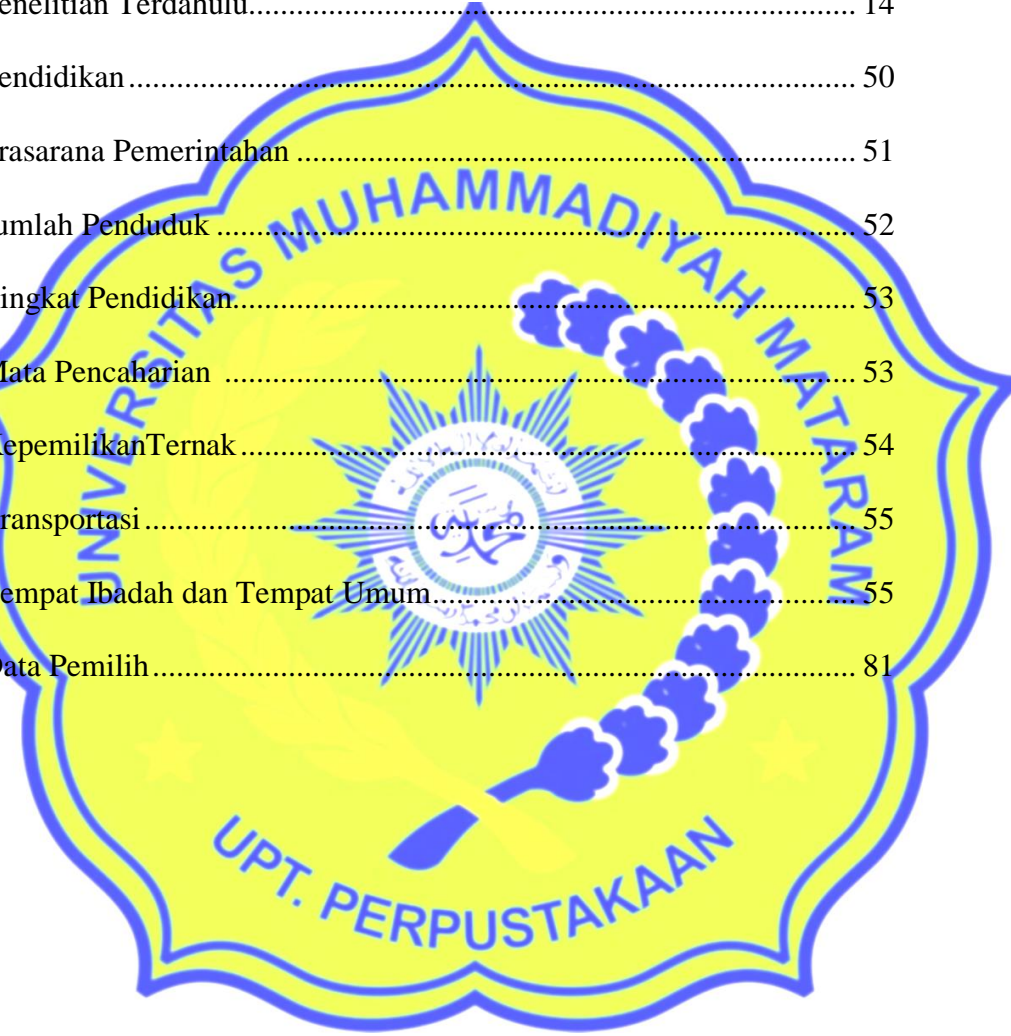
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1.3.Batasan Masalah.....	8
1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5.Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Landasan Teori.....	16
2.3. Perilaku Politik.....	19
2.4. Tinjauan Tentang Pemilihan	30
2.3. Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	36

3.1. Metode yang digunakan	36
3.2. Lokasi Penelitian	37
3.3. Teknik Pengumpulan Data	37
3.4. Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.2. Perilaku Politik Masyarakat Desa Gelangsar Dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018	56
4.3. Hasil Perilaku Politik Masyarakat Desa Gelangsar Dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat Tahun 2018	60
BAB V PENUTUP	96
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	

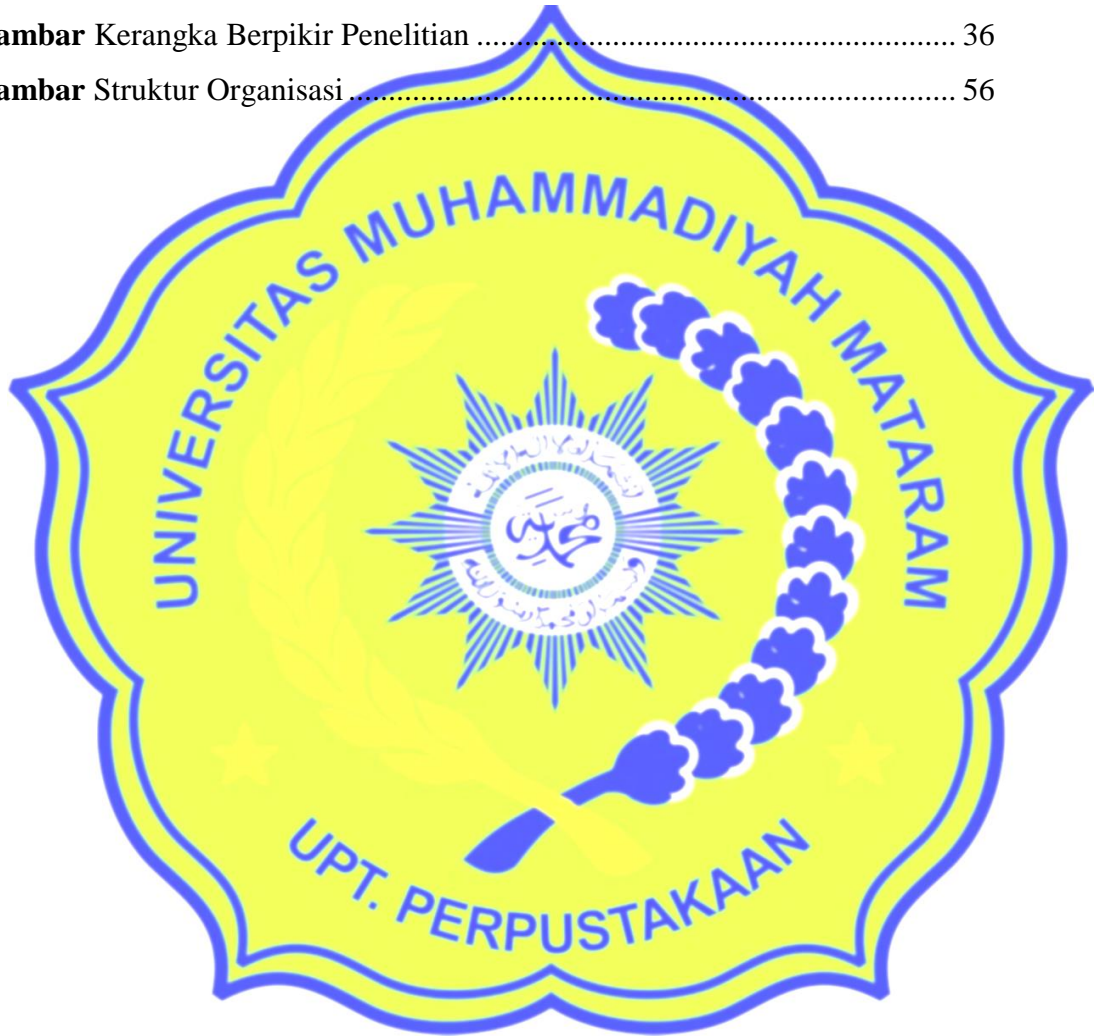
DAFTAR TABEL

Tabel Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel Pendidikan.....	50
Tabel Prasarana Pemerintahan.....	51
Tabel Jumlah Penduduk.....	52
Tabel Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel Mata Pencapaian.....	53
Tabel Kepemilikan Ternak.....	54
Tabel Transportasi.....	55
Tabel Tempat Ibadah dan Tempat Umum.....	55
Tabel Data Pemilih.....	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Berpikir Penelitian	36
Gambar Struktur Organisasi	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu tolak ukur negara demokrasi. Pemilu merupakan proses untuk mewujudkan cita-cita rakyat dalam menyongsong kehidupan bernegara yang lebih baik. Pemilihan Gubernur (Pilgub) serentak 2018 mendatang merupakan langkah awal terbentuknya mekanisme baru dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 tersebut merupakan upaya terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara.

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan (Sumarno, 2005:131).

Salah satu tolak ukur negara demokrasi ialah adanya penyelenggaraan pemilu. Pemilu di Indonesia dilakukan secara berkala untuk memilih pemimpin. Demokrasi menurut Abraham Lincoln merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu menjadi salah satu pijakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, terlebih Pemilihan Kepala Daerah provinsi

Tenggara Barat merupakan ajang pemilihan umum yang dilaksanakan langsung oleh rakyat.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan cara melatih masyarakat memiliki kesadaran berdemokrasi. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi Pancasila. Pilkada menunjukkan adanya pola kehidupan sistem kedaulatan rakyat yang demokratis. Rakyat Indonesia dapat turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam memilih wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Sudijono Sastroatmodjo (2004:8) perilaku politik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat.

Pedoman penyelenggaraan pemilu dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam peraturan tersebut merupakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum penyelenggaraan 3 Pemilihan Umum harus memiliki beberapa asas seperti mandiri, jujur, adil,

kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesibilitas.

Dalam Pilkada, pemilih yang telah mengidentifikasi dirinya dengan partai tertentu akan memilih kandidat yang diusung oleh partai tersebut. Pemilih akan memilih kandidat yang memiliki karakter personal baik seperti tegas, berintegritas, berwibawa, ramah dll. Pemilih akan memilih kandidat yang menawarkan isu kampanye yang sesuai dengan kebutuhan pemilih, seperti: pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dll. Pada beberapa Pilkada kita temui fakta bahwa kandidat yang diusung oleh mayoritas partai di DPRD tidak selamanya berbanding lurus dengan perolehan suara kandidat. Artinya orientasi pemilih pada daerah tersebut bukan kepada partai namun kepada kandidatnya. Sementara itu hasil penelitian Kadek (2012) pada Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Barat, tahun 2018 menyimpulkan jika siapapun calon Gubernur yang diusung oleh Partai akan menjadi pemenang Pilkada. Artinya orientasi pemilih pada Pilkada, Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih cenderung ke kandidat dari pada partai politik. Berdasarkan pengamatan penulis, pada konteks.

Pilkada pemilih lebih cenderung pada faktor orientasi kandidat dibanding partai politik dan hanya pada daerah-daerah tertentu yang memang menjadi basis ideologis partai sejak lama kondisi sebaliknya terjadi. Namun juga tidak dipungkiri jika semakin banyak partai pendukung maka akan semakin memudahkan dalam pembentukan struktur pemenangan hingga level desa/kelurahan karena melekat pada struktur partai. Ketiga pendekatan diatas tidak serta merta dapat digeneralisasi untuk satu daerah. Tipologi dan karakteristik sosial budaya

masyarakat yang berbeda menyebabkan karakteristik pemilih antara daerah satu dengan lainnya dapat berbeda.

Partisipasi politik masyarakat Desa Gelangsar akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berlangsung, dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik terror dan politik uang. Pada umumnya para calon kepala daerah memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara yang saya lakukan di desa gelangsar pada tanggal 11 Februari 2019 bahwa masyarakat desa gelangsar adalah masyarakat yang memahami politik dan ikut serta dalam pesta demokrasi salah satu contoh pada pemilihan Gubernur dan wakil Provinsi Nusa Tenggara Barat ialah pada tahun 2018 yang lalu seluruh masyarakat desa gelangsar ikut berpartisipasi untuk mengikuti pesta demokrasi dan ikut serta kampanye politik. Masyarakat desa gelangsar cenderung melihat sosok atau seorang Figure pada saat pemilihan kepala daerah di bandingkan dengan wakil rakyat dengan alasan bahwa seorang wakil rakyat yang tidak pernah sekali pun melihat atau mengenal calon sebelumnya sehingga pada saat pesta demokrasi masyarakat cenderung mengabaikan hak suara mereka dan mereka pun tidak melihat visi misi namun

yang mereka butuhkan ialah hasil yang nyata. Di bandingkan dengan pemilihan gubernur pada tahun yang lalu sikap politik masyarakat desa gelangsar yang baik dan dapat memberikan hak suara mereka sepenuhnya pada kandidat yang mereka anggap layak memimpin Provinsi Nusa Tenggara Barat lima tahun ke depan dan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih maju.

Dilakukan upaya pelestarian sistem politik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan politik, antara lain sosialisasi politik dan pendidikan politik, Sosialisasi politik sering juga disamakan dengan pendidikan politik sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah dan membentuk sikap dan perilaku berdasarkan nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Desa Gelangsar itu sendiri.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama" (Syaffie, 2002: 132). Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggung jawab bersama dari setiap tujuan tersebut.

Menurut Huntington yang dikutip dari Soemarsono dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Politik yang dimaksud dengan partisipasi adalah: Partisipasi dapat bersifat perorangan atau secara kelompok, diorganisasikan atau

secara spontan, ditopang atau sporadis, secara baik-baik atau dengan kekerasan, legal atau tidak legal, aktif atau tidak aktif (Hutington dalam Soemarsono, 2002:4.4).

Adapun Pengertian desa menurut Haw Widjaja dalam bukunya Pemerintahan Desa dan Marga adalah sebagai berikut:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di daerah (Widjaja, 2002:65).

Pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak diseluruh Indonesia yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2018 lalu, berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, masyarakat di Desa Gelangsar tidak semua memberikan hak pilih. Kenapa hal ini terjadi, menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai faktor atau alasan yang mempengaruhi pemilih maka diharapkan dapat dibuat sebuah solusi untuk mengantisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas dari pemilu.

Dengan melihat uraian diatas, dengan mempertimbangkan sisi signifikansi dari perilaku pemilih, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan perilaku politik masyarakat yang berjudul **“Perilaku Politik Masyarakat Desa Gelangsar Dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Studi Kasus Desa Gelangsar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat”**, pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 lalu. Mengapa wilayah ini penulis anggap

mempunyai signifikansi untuk dilakukan penelitian terhadap perilaku pemilihnya, karena, penulis melihat cukup terjadi dinamika pada perilaku pemilih di wilayah ini.

1.2.Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian pokok dari kegiatan penelitian, sehingga perumusannya perlu tegas dan jelas agar proses penelitian bisa benar-benar terarah dan terfokus ke permasalahan yang jelas. Perumusan masalah juga diperlukan untuk mempermudah menginterpretasikan data dan fakta yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bina Aksara, 1996, Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku politik masyarakat Desa Gelangsar dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Desa Gelangsar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat Desa Gelangsar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat?

1.3. Batasan Masalah

Dari diidentifikasi masalah yang terapar di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka peneliti perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah yang menjadi obyek penelitian yang dibatasi

hanya ada pada Perilaku Politik Masyarakat Desa Gelangsar Dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Studi Kasus Di Desa Gelangsar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Pengaruh etnis juga mempengaruhi pilihannya seseorang dalam memilih, ini dikarenakan seseorang akan memilih yang berasal dari ras mereka sendiri. Pilihan ini lahir ketertarikan kesukaan yang begitu kuat dalam diri seseorang, contoh masalah perilaku pemilihan etnis sasuk sebagaimana diketahui pada masyarakat di Desa Gelangsar dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Perilaku Politik Masyarakat Desa Gelangsar dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Politik Masyarakat Desa Gelangsar

1.4.2 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan dalam pelaksanaan Pilkada yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dunia pendidikan. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku politik masyarakat dalam Pilgub Tahun 2018 Nusa Tenggara Barat.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna agar dapat mengetahui apa saja persepsi mahasiswa terhadap Pilkada. Kemudian memberi kontribusi pemikiran terhadap para pendidikan maupun dikalangan masyarakat dalam memberikan perannya untuk kemajuan pendidikan politik melalui wawasan terhadap pelaksanaan Pilkada.

- a. Bagi peneliti memberikan wawasan pengetahuan mengenai perilaku politik masyarakat dalam Pilgub Nusa Tenggara Barat Tahun 2018
- b. Bagi masyarakat memberikan pengetahuan politik guna meningkatkan perilaku politik mereka dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara di era demokrasi.

1.5.Sistematika Penulisan

Secara garis besar Skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan beberapa subbab.Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal tertulis,berikut ini penulisannya secara lengkap:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini membahas latar Belakang masalah,rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan pengertian tentang perilaku politik,partisipasi politik,bentuk-bentuk perilaku politik, faktor-faktor perilaku politik masyarakat Desa Gelangsar untuk pemilihan pemimpin dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam setiap lima tahun dalam satu periode.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini meliputi hasil penelitian dan menjelaskan tentang proses penelitian yang ada dilapangan pada saat peneliti melakukan penelitian di tempat atau objek yang sudah dinyatakan mempunyai masalah atau kasus yang akan diteliti untuk ditemukan pokok masalah tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan argumentasi untuk menjawab masalah pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan oleh peneliti dalam penelitiannya dan saran merupakan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan kekurangan dari skripsi yang telah disusun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti - peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku –buku maupun skripsi dan paper dalam rangka mendapatkan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan.

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh *Malisa Ladin* mahasiswa jurusan politik dan kewarganegaraan Fakultas ilmu sosial Universitas negeri semarang 2016 yang berjudul “SIKAP POLITIK PETANI DALAM PILKADA KABUPATEN SEMARANG 2015 DI KELURAHAN PRINGAPUS KECAMATAN PRINGAPUS” hasil penelitian pada judul di atas ialah memeberikan solusi dan pendidikan politik pada pada masyarakat petani pada pemilihan kepala daerah kabupaten semarang agar dapat memberikan hak suara kepada kandidat yang memnurut piliahan mereka.

Pada penelitian kedua yang dilakuakn oleh *Meytisen Hendra Ngongoloy* Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Universitas Sam Ratulangi Manado 2014 yang berjudul “PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI DESA TEMBOAN KECAMATAN LANGOWAN SELATAN” hasil penelitian pada judul diatas Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi jika dilihat dari

tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan yang dilakukan masyarakat kurang aktif dalam memberikan partisipasi politiknya.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ira Indra Gerungan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT Manado tahun 2015 dengan judul “PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT DESA TOULIANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA 2015(Suatu Studi di Desa Touliang Kakas Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa)” hasil penelitian dari judul di atas ialah Lemahnya sistem perundangan pemilihan jelas akan berdampak bagi para penyelenggara baik itu KPU maupun dari sisi pengawasannya yang dalam hal merupakan tugas dari PANWAS. Tidak jarang KPU dan PANWAS di daerah kehilangan kepercayaan diri dalam menjalankan fungsinya sebagai akibat lemahnya aturan yang dibuat. Kurangnya atau lemahnya sosialisasi yang dilakukan, yang disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki, independensi para penyelenggara sangat sulit diciptakan sebagai salah satu akibat dari peraturan yang ada.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Muhamad Riska Aditama mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2013 dengan judul “PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KENDAL 2010” hasil penelitian dari judul di atas ialah Masyarakat Kabupaten Kendal mayoritas menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2010 karena masyarakat sadar akan haknya sebagai warga negara dan masyarakat berharap melalui Pemilu tersebut akan dapat melahirkan pimpinan yang nantinya mampu membawa Kendal kearah yang lebih baik. Perilaku memilih warga Kabupaten Kendal Tahun 2010 juga masih dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti “politik uang”. Di berikan masyarakat uang oleh timses para calon saat kampanye agar dapat mengikuti kampanye dalam pemilihan kepala daerah Kendal tahun 2010.



Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Critical Point
1.	Malisa Ladini (2016)	Sikap Politik Petani Dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 Di Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus	Pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif	ialah memeberikan solusi dan pendidikan politik pada pada masyarakat petani pada pemilihan kepala daerah kabupaten semarang agar dapat memberikan hak suara kepada kandidat yang menurut piliahan mereka.	Di dalam penelitian ini harus lebih mengutamakan dan melihat kepada aspira rakyat agar partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi lebih tinggi dan paham terhadap perilaku politik
2	Meytisen Hendra Ngongoloy (2014)	Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di desa temboan kecamatan langowan selatan	Pendekatan Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	diatas Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan yang dilakukan masyarakat kurang aktif dalam memberikan partisipasi politiknya.	Kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang aktif dalam memberikan hak suara mereka kepada pemimpinnya, guna tercapainya pembangunan daerah yang akan di capai.

3.	Ira Indra Gerungan (2015)	perilaku memilih masyarakat desa touliang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara 2015(suatu studi di desa touliang kakas kecamatan kakas barat kabupaten minahasa)	Pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif	Lemahnya sistem perundangan kepemiluan jelas akan berdampak bagi para penyelenggara baik itu KPU maupun dari sisi pengawasannya yang dalam hal merupakan tugas dari PANWAS. Tidak jarang KPU dan PANWAS di daerah kehilangan kepercayaan diri dalam menjalankan fungsinya sebagai akibat lemahnya aturan yang dibuat. Kurangnya atau lemahnya sosialisasi yang dilakukan, yang disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki, independensi para penyelenggara sangat sulit diciptakan sebagai salah satu akibat dari peraturan yang ada.	KPU dan BANWASLU harus mampu membuat satu regulasi UUD yang memang mengatasi persoalan demokrasi berjalan dengan lancar agar masyarakat pada dasarnya paham demokrasi yang sebenarnya karna minim kepercayaan masyarakat terhadap baik pemilihan eksekutif dmaupun legislatif karna di tiap pemilihan legislative dan eksekutif masih banyak angka yang lebih besar kita lihat masyarakat golput terhadap pesta demokrasi
4.	Muhamad Riska Aditama (2010)	perilaku memilih masyarakat pada pemilu kepala daerah dan	Pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif	ialah Masyarakat Kabupaten Kendal mayoritas	Jadi sikap atau perilaku politik masyarakat Kendal

		<p>wakil kepala daerah kabupaten kendal 2010</p>		<p>menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 karena masyarakat sadar akan haknya sebagai warga negara dan masyarakat berharap melalui Pemilu tersebut akan dapat melahirkan pimpinan yang nantinya mampu membawa Kendal kearah yang lebih baik. dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti “politik uang”.di berikan masyarakat uang oleh timses para calon saat kampanye agar dapat mengikuti kampanye dalam pemilihan kepala daerah Kendal tahun</p>	<p>harus mampu membedakan mana politik yang ilmiah dan mana politik pencitraan terhadap pesta demokrasi</p>
--	--	--	--	---	---



2.2.Landasan Teori

Unsur penelitian yang paling besar peranannya dalam penelitian adalah teori karena dengan unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Oleh karena itu, dalam kerangka teori ini penulis akan memaparkan teori-teori yang merupakan landasan berpikir dalam menggambarkan masalah penelitian yang sedang disoroti. Teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian ini antara lain:

Mar'at (1992:21)mengemukakan definisi sikap yakni bahwa “Sikap sebagai derajat atau tingkat kesesuaian seseorang terhadap objek tertentu”. Mar'at juga mendefinisikan “Sikap merupakan proses sosialisasi dimana seseorang akan bereaksi sesuai dengan rangsang yang diterimanya”. Mar'at juga mengatakan bahwa seseorang akan bereaksi apabila rangsang yang diberikan oleh seorang koununikator dapat diterima oleh komunikan yang diakibatkan dari adanya hidup bermasyarakat. Mar'at dalam bukunya “Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya”, mengutip pendapat Hovland, Janis, & Kelley yang menyatakan bahwa dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variabel penting yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan.Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada Perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkannproses berikutnya. Komunikan akan mengolah dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap.

Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude pertama kali digunakan oleh Herbert Spencer yang menggunakan kata ini untuk menunjuk suatu status mental seseorang. Kemudian oleh para psikolog, sikap dikonsepsikan sebagai alasan perbedaan individual. Sikap akan menentukan sifat, hakikat, baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang. W. J. Thomas (dalam Ahmadi, 2007:149) mengemukakan sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata atau yang akan terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sikap merupakan konsep yang membantu memahami tingkah laku. Sejumlah perbedaan tingkah laku dapat merupakan pencerminan atau manifestasi dari sikap yang sama.

Sikap dapat dilihat dari beberapa contoh, misalnya penunjukan sikap positif terhadap musik klasik menghasilkan tingkah laku yaitu menghadiri setiap pementasan musik klasik, membeli kaset-kaset musik klasik, selalu mengikuti acara-acara baik radio maupun TV yang menyiarkan musik klasik, membaca buku-buku yang berhubungan dengan musik klasik. Sikap sosial dinyatakan bukan hanya oleh seseorang saja tetapi diperhatikan oleh orang-orang sekelompoknya. Gerungan (2009:201) menegaskan bahwa sikap merupakan sebuah pola yang dapat terbentuk melalui pergaulan, misalnya seseorang yang hidup dalam keluarga disiplin, akan cenderung disiplin juga.

Suatu hal yang penting dalam fenomena pemilu adalah sikap politik masyarakat.

G.W. Alport (dalam Widayatun, 1999:218) menjelaskan sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Selanjutnya pengertian tersebut diperjelas oleh Widayatun bahwa sikap adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya.

Rakhmat (1992:39) mengemukakan lima pengertian sikap, yaitu: Pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Kedua, sikap mempunyai daya penolong atau motivasi. Ketiga, sikap lebih menetap. Keempat, sikap mengandung aspek evaluatif: artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kelima, sikap timbul dari pengalaman: tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah.

Cottam (2012:99) mengatakan bahwa salah satu hal terpenting dalam penelitian sikap politik adalah adanya asumsi bahwa sikap seseorang akan menentukan perilaku politik. Pengertian perilaku politik menurut Sastroatmodjo (1995:13) perilaku politik adalah penilaian peranan warga negara dalam sistem politik, baik segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang bisa aktor politik, pakar politik, partai politik dan sebagainya sepanjang hal yang dilakukannya itu mengandung muatan politis. Rakhmat (1992:32) juga mengatakan bahwa pengertian sikap dirinikan menjadi lima yaitu:

Berkowitz (dalam Azwar, 2013:5) mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Pengertian sikap memang beragam, maka oleh para ahli Psikologi Sosial mutakhir mengklasifikasikan pemikiran tentang sikap terdapat dua pendekatan. Menurut Breckerdan Rejcki (dalam Azwar, 2013:6) pendekatan yang pertama adalah memandang sikap dari ketiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Pendekatan yang kedua timbul karena kognitif, afektif, dan perilaku dalam membentuk sikap.

Simpulan dari pengertian sikap tersebut yakni sikap merupakan kumpulan tiga komponen yang harus dipahami, yakni: afektif yaitu aspek emosional dari factorsosio psikologis, didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan

sebelumnya, kognitif yaitu aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, dan konatif yaitu aspek volitional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak.

2.3.Perilaku Politik

2.3.1. Pengertian perilaku politik

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik (Kristiadi, 2006: 28).

Sejalan dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut. Beberapa negara berkembang sering dihadapkan dengan masalah integrasi nasional yang menjadi tantangan dalam pembangunan sistem politik di negara tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari dua dimensi, yakni:

- a) Dimensi *horizontal*, yaitu terdapat perbedaan suku, ras, agama, golongan dan lain-lain yang dipengaruhi oleh ikatan primordial yang hidup dalam norma-norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menghambat perkembangan proses integrasi nasional.
- b) Dimensi *vertikal*, yaitu berupa masalah yang muncul dan memicu terjadinya jurang pemisah (gap) antara kalangan elit yang eksekutif dengan kelompok mayoritas (massa). Stratifikasi sosial yang terjadi menimbulkan rasa

keterasingan masyarakat dari kalangan elit yang sedang berkuasa (Kristiadi, 2006: 34)

Perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi konkretnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politik. Sikap warga negara, respon dan aktivitasnya terhadap sistem politik yang berlaku dipengaruhi oleh budaya politik yang membentuknya (Huntington, 2010: 42).

Perilaku politik (*political behavior*) dinyatakan sebagai suatu telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Perilaku politik juga sering dikaitkan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Adapun yang melakukan kegiatan politik adalah pemerintah dan masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada hakikatnya seorang individu atau masyarakat setelah memiliki sikap politik terhadap suatu objek politik sebagai manifestasi nyata dari sikap politik yang merupakan sikap alami yang terdapat pada setiap individu. Melakukan tindakan atau aktivitas politik lalu tindakan ini yang kemudian disebut sebagai perilaku politik (Efriza, 2012: 25).

Berdasarkan beberapa definisi perilaku politik menurut para ahli tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku politik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat berkaitan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut.


2.3.2. Pembagian Perilaku Politik

Pelaksanaan pemilu di suatu Negara ataupun dalam pelaksanaan pilkada langsung di suatu daerah, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada tersebut hal ini jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku politik dalam proposal penelitian ini perilaku politik dapat dibagi dua sebagai berikut:

- a. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah, yakni bertanggungjawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik.
- b. Perilaku politik warga Negara biasa (baik individu maupun kelompok), yakni berhak mempengaruhi pihak yang pertama dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan politik yang dilakukan oleh warga Negara biasa (individu maupun kelompok) disebut partisipasi politik (Rahman, 2007: 29).

Menurut Mahendra (2005: 36) menjelaskan bahwa kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga unit analisis yaitu :

- 1) Aktor politik (meliputi aktor politik, aktivitas politik, dan individu warga Negara biasa).
- 2) Agregasi politik (yaitu individu aktor politik secara kolektif seperti partai politik, birokrasi, lembaga-lembaga pemerintahan).
- 3) Topologi Kepribadian Politik (yaitu kepribadian pemimpin, seperti Otoriter, *Machiavelist*, dan Demokrat). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik (pemimpin, aktivis, dan warga biasa) antara lain:
 - a) Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa.

- 
- b) Lingkungan sosial politik langsung yang membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok bergaul. Dari lingkungan ini, seorang aktor politik mengalami proses sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat dan norma kehidupan bernegara.
- c) Struktur kepribadian. Hal ini tercermin dalam sikap individu (yang berbasis pada kepentingan, penyesuaian diri dan eksternalisasi).
- d) Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya (Mahendra, 2005: 41).

2.3.3. Tinjauan Tentang Perilaku Memilih

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks politik, Perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan Perilaku politik.

Menurut Ramlan Surbakti (1999:11) ditengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari Perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa Perilaku politik, yaitu Perilaku yang bersangkutan dengan proses politik.

Sebagian lainnya berupa Perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan

barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik.

Salah satu wujud dari Perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat adalah Perilaku politik sebagai Perilaku yang bersangkutan dengan proses politik, untuk membedakannya dari Perilaku ekonomi, keluarga, agama dan budaya. Sedangkan politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah (Anwar Arifin, 2011: 45).

Secara lebih rinci Popkin dalam Anwar Arifin (2011: 45) membedakan antar pilihan politik sebagai wujud Perilaku politik dengan pilihan pribadi terhadap produk-produk konsumtif sebagaimana dalam Perilaku ekonomi. Menurutnya ada empat hal yang membedakan Perilaku tersebut. *Pertama*, memilih kandidat politik tidak langsung dirasakan manfaatnya sebagaimana pilihan terhadap pilihan konsumtif, melainkan manfaatnya diperoleh dimasa depan. *Kedua*, pilihan politik merupakan tindakan kolektif dimana kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Jadi pilihan seseorang senantiasa mempertimbangkan pilihan orang lain. *Ketiga*, pilihan politik senantiasa diperhadapkan dengan ketidakpastian utamanya politisi untuk memenuhi janji politiknya. *Keempat*, pilihan politik membutuhkan informasi yang intensif demi tercapainya manfaat dimasa depan. Dari beberapa karakteristik tentang Perilaku memilih tersebut, yang tentunya akan berimplikasi dalam pemberian suara pada proses pemilihan umum (Pemilu)

2.3.4. Sikap Politik

Sastroatmodjo (1995:4) mengemukakan bahwa sikap politik dapat dinyatakan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut. Berdasarkan sikap politik akan dapat diperkirakan perilaku politik apa yang akan muncul. Sikap pada umumnya bersifat relative menetap atau tidak mudah berubah. Istilah sikap politik erathubungannya dengan *political efficacy* adalah istilah yang sering digunakan. *Political efficacy* yang secara umum yang dikemukakan oleh Schulz (1996:2) tentang *Self efficacy*.

Self efficacy adalah penilaian tentang seberapa baik seseorang dapat menampilkan perilaku yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi atau tugas tertentu. Penilaian ini berpengaruh kuat terhadap pilihan-pilihan individu, usaha, ketekunan serta emosi yang dikaitkan dengan tugas. Konsep *self efficacy* merupakan elemen penting dari teori social kognitif tentang proses belajar, dimana pembelajar mengalami proses belajar secara langsung. Sikap politik dalam bidang politik dapat dilihat dari kepercayaan individu umumnya dikaitkan dengan pengalaman langsung individu terlibat dalam partisipasi politik atau persepsi tentang partisipasi politik berdasarkan pengalaman orang lain.

Political efficacy dalam pandangan tradisional adalah persepsi yang dimiliki seseorang tentang dirinya dan kemampuannya untuk mempengaruhi politik situasi tertentu oleh Sakti (2009:32). *Politica efficacy* merupakan perasaan tentang tindakan individu dalam bidang politik akan membawa, atau akan dapat membawa dampak bagi perubahan proses politik. *Political efficacy* merupakan persepsi individual yang berkaitan dengan seseorang dalam mempengaruhi proses kebijakan. *Political*

efficacy adalah perasaan individu mengenai kemampuan yang ia miliki untuk mengerti politik dan keberhasilannya yang mereka dapatkan ketika terlibat dalam proses politik. *Politica efficacy* sebagai kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya untuk memahami politik, untuk didengar dan untuk membuat perubahan politik.

Sastroatmodjo (1995:5) mengemukakan bahwa konsep sikap dapat dihubungkan dengan politik, sehingga sikap dapat dilakukan oleh individu atau berbagai kelompok. Sikap politik dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak, berpersepsi seseorang atau kelompok untuk menghadapi, merespon masalah-masalah politik yang terjadi yang diungkapkannya dengan berbagai bentuk.

a) **Pembentukan dan Perubahan Sikap**

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu Azwar (2013:30). Interaksi sosial mengandung arti lebih daripada sekedar adanya kontak sosial dan hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial. Interaksi sosial tersebut dapat membuat individu dapat bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai obyek psikologis yang dihadapinya. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi, atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu.

Sikap menimbulkan stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial kebudayaan misalnya keluarga norma, golongan agama, dan adat istiadat. Sikap tumbuh dan

berkembang dalam basis sosial yang tertentu, misalnya ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Faktor-faktor yang perubahan sikap intern faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini berupa *selectivity* atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

b) Pengukuran Sikap Secara Langsung

Proses untuk melakukan terhadap sikap yaitu pertama menghindari pernyataan yang menunjuk kepada masa lampau sebaliknya masa sekarang. Kedua, menghindari pernyataan yang dapat diinterpretasikan dengan lebih dari satu macam. Ketiga, menghindari pernyataan yang tidak relevan dengan objek psikologi yang akan diungkap. Keempat, menghindari pernyataan yang mungkin dibenarkan oleh setiap orang atau sebaliknya tidak seorang pun.

c) Struktur Sikap

Struktur sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Mann (1969) (dalam Azwar, 2013:31) mengemukakan komponen kognitif merupakan persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Komponen kognitif berisi persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Komponen kognitif ini dapat dipahami bahwa komponen kognitif berisi pengetahuan, pendapat seseorang akan suatu objek atau fenomena, dan kepercayaan seseorang terhadap sesuatu. Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum bahwa komponen afektif merupakan perasaan yang timbul dari seseorang terhadap suatu objek. Komponen perilaku atau konatif

dalam struktur sikap merupakan kecenderungan berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan suatu objek persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu.

d) Ciri-ciri dan Fungsi Sikap

Ahmadi (2007:164) mengemukakan bahwa sikap akan menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya dengan perangsang yang relevan, orang-orang atau kejadian-kejadian. Ciri-ciri sikap yang pertama yaitu sikap dapat dipelajari. Sikap dapat dipelajari secara tidak sengaja dalam memahami suatu hal yang akan membawa seseorang untuk melakukan hal yang lebih baik, membantu tujuan kelompok, atau memperoleh sesuatu nilai yang sifatnya perseorangan.

Kedua, sikap memiliki kestabilan. Sikap bermula untuk dipelajari kemudian menjadi dorongan yang lebih kuat, stabil, dan melalui pengalaman. Misalnya perasaan suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Ketiga, sikap merupakan *personal-social significance*. Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan juga antara orang dan barang atau instansi atau situasi. Jika seseorang merasa orang lain menyenangkan, maka itu akan berarti bagi dirinya. Keempat, sikap berisi *cognisi* dan *affeksi*. Komponen *cognisi* daripada sikap ialah berisi informasi yang faktual.

2.3.5. Masyarakat Politik

Masyarakat politik ialah masyarakat yang memiliki kesadaran tentang arti politik atau masyarakat yang merasa bahwa partisipasinya dalam kehidupan bernegara sebagai warga negara menjadi amat penting untuk kehidupannya. Tugas yang diamanatkan pada negara bersifat menyeluruh dan kompleks, sehingga tanpa

adanya dukungan yang positif serta partisipasi dan peran serta seluruh warga negara atau masyarakat, maka tugas yang diamanatkan pada negara tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Beginilah seharusnya hubungan negara dengan warga negara terjalin.

Masyarakat politik menjalankan fungsi sebagai kekuatan dan mempunyai kontrol dalam sosial politik yang memiliki pengertian berbeda, sementara masyarakat sipil merupakan wilayah persetujuan. Masyarakat politik memiliki peranan sebagai dominasi langsung (koersif) atau berada didalam kendali negara sektor dalam masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

1. Sektor negara (masyarakat politik), Lembaga negara dengan pilar utamanya seperti parlemen, pemerintah dan lembaga peradilan memiliki prinsip kekuasaan yang bersifat memaksa (*coercion*). Dalam hal ini negara memiliki hak untuk menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan peraturan. Misalnya dalam hal pajak, putusan peradilan yang bersifat memaksa dan terikat, serta menjamin hak warga negara dalam hal kepastian hukum.
2. Sektor pasar (*market sector*), salah satu pilar utama yang mengatur tentang pasar dan keuangan dalam hal ini perusahaan negara maupun swasta, termasuk lembaga keuangan (*bank*) yang memiliki mekanisme untuk menghasilkan dan memperoleh laba (*market mechanism for profit*). Baca juga: Peran Dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Sentral
3. Sektor voluntir (*the third sector*). Lembaga swadaya masyarakat (*new social movement*) dalam perkembangannya memiliki nilai kesukarelaan

(*voluntary*) yang tanpa mementingkan laba (*non profit*) dan tidak bersifat memaksa (*non coercive*)

Di dalam ilmu politik, masyarakat terdiri dari tiga karakter diantaranya:

1. Masyarakat Kritis, merupakan masyarakat yang berani mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara. Berani mengemukakan pendapat serta melawan dominansi dalam suatu komunitas, baik dalam serikat, gerakan sosial maupun pemerintahan.
2. Masyarakat Konservatif, merupakan masyarakat hanya menerima dan selalu mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dan tidak berusaha mengubah apapun.
3. Masyarakat Idealis, merupakan masyarakat yang memiliki cita-cita yang tinggi dan merasa mempunyai pengetahuan politik, hingga apapun kebijakan pemerintah selalu tidak pernah sesuai harapannya.



2.4 Tinjauan Tentang Pemilihan

2.4.1 Pengertian Pemilihan

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah:

“Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Huntington dalam Rizkiyansyah (2007:3) menyatakan bahwa sebuah Negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.

Menurut Karim dalam Dani (2006:11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Rahman (2002:194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

Sedangkan, Rizkiyansyah(2007:3) “Pemilihan Umum adalah salah satu prana yang paling *representatif* atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

2.4.2 Asas Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu hendaknya dilaksanakan secara bebas dan bersih, yaitu Pemilu yang memberi kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberi suaranya kepada para calon atau partai politik menurut pilihannya sendiri. Ini berarti segala taktik dan cara yang berdasarkan politik uang, ikatan jasa dan intervensi haruslah dilarang oleh undang-undang. Perlu regulasi (pengaturan) mengenai batasan yang jelas yang menyatakan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan umum boleh dilaksanakan.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai Pemilu di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak

langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.5 Kerangka Berfikir

1. Pengetahuan Politik terhadap perilaku Politik Masyarakat Desa Gelangsar, pada pemilihan gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2019.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari seberapa besar pengaruh pengetahuan politik terhadap perilaku politik masyarakat, dimana pengetahuan politik merupakan dasar dari perilaku politik seseorang.

Ketika seseorang memiliki kesadaran politik yang diperoleh dari pengetahuan politik sehingga mempengaruhi partisipasi politik, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu.

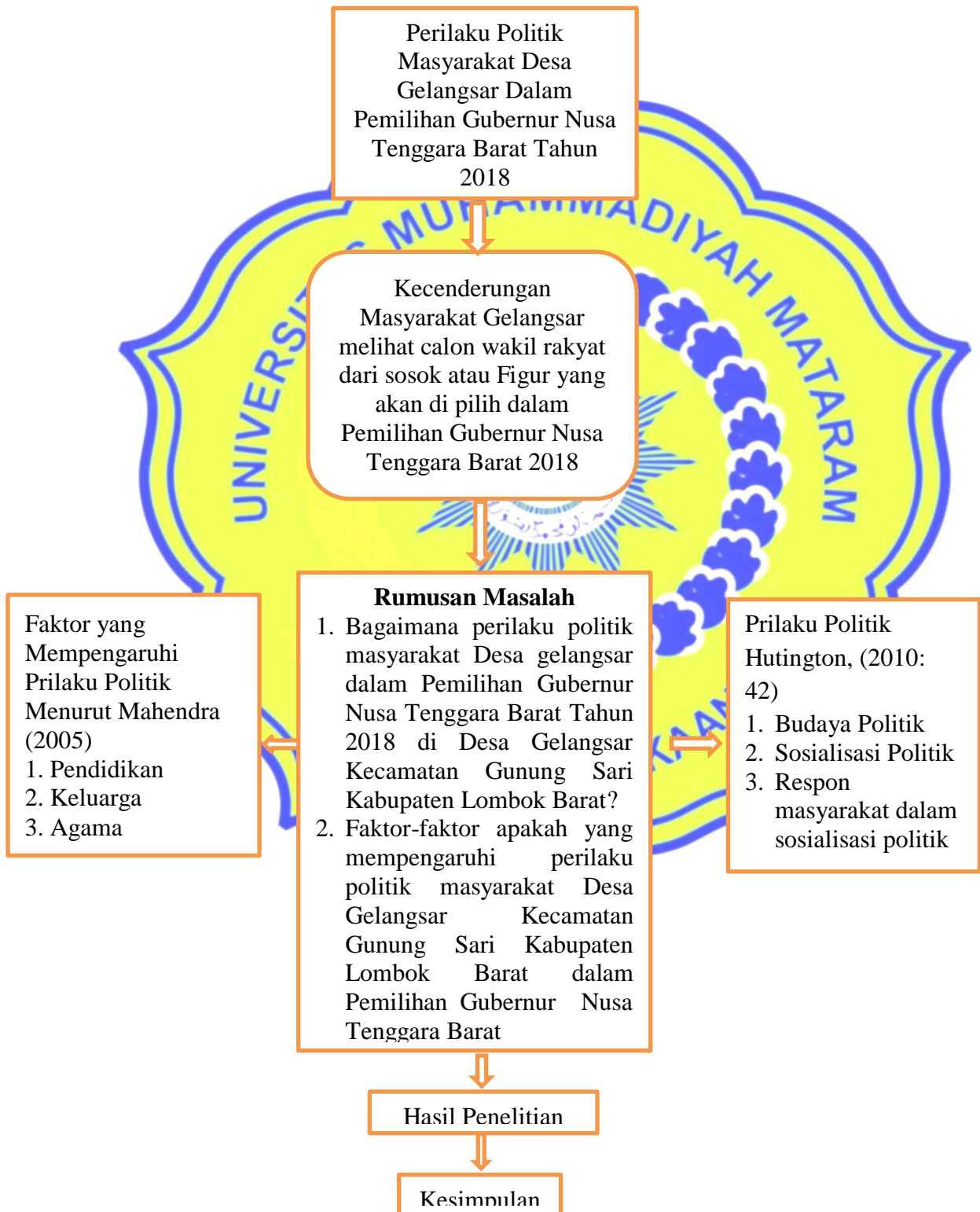
2. Pengaruh Aktor Politik terhadap Perilaku Politik Masyarakat Desa Gelangsar, pada pemilihan gubernur nusa tenggara barat tahun 2019.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari seberapa besar pengaruh politik terhadap perilaku politik masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah salah satunya dapat diperoleh dari penilaian masyarakat terhadap aktor politik sehingga mampu mempengaruhi partisipasi politik yang dapat dilihat dari interaksi antara aktor politik dan masyarakat, hubungan aktor politik dan masyarakat terhadap pesta demokrasi pada pemilihan gubernur nusa tenggara barat.

Kesadaran politik adalah suatu keadaan dimana seseorang tanggap dan mengerti situasi tentang hal yang mencakup mengenai politik, wawasan politik, orientasi politik yang memungkinkan seseorang tersebut memberikan pendapat, memberikan solusi, memberikan keputusan dan mendorong agar bergerak dalam pembangunan. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan politik dan partisipasi politik masyarakat terhadap politik. Di sisi lain, rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang diwakili oleh keberadaan aktor politik dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Secara umum kerangka berfikir penelitian ini dapat di lihat melalui gambar skema di bawah ini:



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Dalam setiap usaha untuk mengadakan penelitian tentunya harus di landasi oleh berbagai metode, sehingga terhadap hipotesis yang sebelumnya adalah sudah dapat dibuktikan. Menurut Sugiyono (2013:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka ada beberapa metode yang penyusun pergunakan dalam penelitian sebagai berikut :

Metodologi dalam suatu karya ilmiah seperti halnya paper, makalah, terlebih bagi yang namanya skripsidan di sertai menjadi sangat mutlak adanya dan tidaklah berlebihan kalau penyusun mengatakan tanpa metodologi suatu kerangka ilmiah akan kehilangan arah pembahasannya atau tidak memiliki ujung pangkal serta dapatlah diragukan kadar keilmiahannya.

“Sifat ilmiah erat hubungannya dengan metode penyimpulan suatu tulisan dibuat ilmiah bila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian-pembuktian yang cukup meyakinkan ini biasanya berupa factor-faktor yang dapat secara obyektif dan berhasil lolos dari berbagai proses pengujian”

Metode deskriptif adalah metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan jalan mengumpulkan, menyusun, menjelaskan, menganalisis dan mengumpulkan data. Dengan demikian hasil penelitian ini nantinya akan dipaparkan data-data yang berkenan dengan perilaku politik masyarakat agraris dalam pilgub di NTB tahun

2018 di Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat terhadap perilaku politik.

3.2. Lokasi Penelitian

Sebelum penyusun melakukan penelitian memang melakukan berbagai pertimbangan baik pertimbangan ilmiah maupun pertimbangan praktisnya. Pertimbangan ilmiahnya apa lokasi tersebut mendapat masalah yang banyak dikaji secara ilmiah serta obyek tersebut mudah dijangkau efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya.

Untuk itu daerah penelitian yang ditetapkan adalah di Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok barat.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tugas utama pada saat melaksanakan penelitian lapangan (Field Research) adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusun proposal ini.

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penetapan pengumpulan data sangat penting sekali, disamping akan memudahkan penyusun dalam memasuki tahap dari pembahasannya, dan yang lebih utama lagi setiap peneliti atau penyusun adalah bagaimana memilih dan menggunakan metode yang relevan, mudah dan praktis.

Pengumpulan data pada dasarnya adalah merupakan sebuah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Banyak masalah yang dirumuskan dan tidak akan biasa terpecahkan, karena metode untuk

memperoleh data yang dipergunakan tidak memungkinkan ataupun data yang ada tidak akan menghasilkan data seperti yang diinginkan.

Dalam proposal ini penyusun menggunakan berbagai metode relevan dan focus pembahasan yang ada, metode yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*) Metode ini adalah suatu metode untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan untuk pembahasan skripsi yang akan disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian, dengan kata lain mencari data dan mencari bahan-bahan yang berupa bacaan dari kepustakaan.
2. Penelitian lapangan (*Field research*) yaitu mengadakan penelitian lapangan atau lokasi penelitian dengan mengadakan interview, observasi dan komunikasi dengan responden guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis dalam suatu karya ilmiah. Untuk lebih jelasnya dalam melakukan pengumpulan data, penyusun menggunakan mata, tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu.

1. Pengamatan

Pengamatan baru tergolong sebagai teknik pengumpulan dan jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis.
- b. Pengamatan harus berkaitan untuk penelitian dengan tujuan penelitian yang telah di rencanakan.

- c. Pengamatan tersebut dicatat sebagai sistematis dan dihubungkan dengan persepsi umum dan bukan dipaparkan sebagai set yang menarik perhatian saja.
- d. Pengamatan dapat di cek dan di control atas fasilitas dan mentalitasnya. (Moh.Nazir,1983: 212).

2. Interview (Wawancara)

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya dengan sipenjawab atau responden. Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk janta jawab sambal tatap muka, wawancara adalah proses pengumpulan data atau suatu penelitian. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam melakukan penelitian ada beberapa responden yang perlu di wawancarai untuk mendapatkan informasi lebih detail antara lain:

1. Bahwa informan adalah benar-bener penduduk asli Desa Gelangsar dan banyak mengetahui tentang perilaku politik masyarakat setempat.
2. Bahwa apa yang ditanyakan oleh peneliti kepada subyek adalah benar dan dapat di percaya.
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.

3. Studi Dokumentasi

Pengumpulan bahan melalui Study dokumentasi ini dimaksudkan sebagai salah satu sumber informasinya adalah mencari dan mendapatkan data dan bahan-bahan yang diperlukan pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip kantor. Demikian Study Dokumentasi suatu upaya untuk mendapatkan bahan sumber utamanya, sehingga data masih disebut data primer. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.

3.4. Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu di pecahkan dalam kelompok-kelompok, didalam kategorisasi, dilakukan manipulasi serta proses yang sedemikian rupa, sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.

Dalam penelitian ini merupakan data kualitatif deskriptif, maka analisa yang dilakukan adalah bersifat induktif dan deskriptif.

Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dianalisa dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-

data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti.

Proses analisa data dimulai dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara maupun observasi yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan proses panafsiran data (Moleong: 2003:190).

Dari uraian diatas, maka proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Setelah data dikumpulkan, dibaca, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat abstraks, yakni membuat rangkuman yang inti, membuang data yang tidak perlu, mengatur data dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu di jaga agar tetap berada didalamnya, sehingga penarikan kesimpulan (verifikasi) akhir dari penelitian dapat dilakukan dengan mudah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti dari kegiatan observasi yang berupa kata-kata inti harus segera dirangkum agar pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku politik masyarakat tetap terjaga dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

2. Penyajian Data

Proses analisis selanjutnya adalah penyajian data yang mengorganisir informasi secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam menggabungkan dan merangkai keterikatan antar data dalam penyusun gambaran proses serta memahami fenomena yang ada pada obyek penelitian. Melalui penyajian tersebut, telah memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari data yang diperoleh dilapangan, peneliti sejak awal mulai menarik kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat pertanyaan yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis data terhadap fenomena-fenomena yang ada. Dalam penelitian ini, dapat diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sehingga segera dapat di tarik suatu kesimpulan yang bersifat sementara. Agar kesimpulan itu lebih mantap maka peneliti memperpanjang waktu observasi. Dari observasi tersebut dapat ditemukan data baru yang dapat mengubah kesimpulan sementara, sehingga diperoleh kesimpulan yang mantap.

